

Spiritualitas Pastoral yang Membebaskan: Kritik terhadap Praktik Otoritas Arbitrer dalam Gereja-gereja Pentakostal

Johannes S. P. Rajagukguk
Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Jakarta
Correspondence: johanes.rajagukguk@sttbi.ac.id

Abstract

This study examines liberating pastoral spirituality as a critique of arbitrary authority in Pentecostal churches, where shepherding authority becomes a tool of control once leaders' decisions are sacralized through claims to the Holy Spirit and obedience. Using a qualitative-constructive, practical-critical method, data draw on literature covering Pentecostal spirituality, spiritual abuse, spiritual authority, and congregational agency. First, arbitrary authority works through sacralizing leaders' decisions, monopolizing claims to the Holy Spirit, paralyzing communal discernment, and reinforcing personal charisma. Second, its gravest impact is loss of congregants' spiritual agency: weakened capacity to hear, weigh, choose, and answer before God. Third, liberating pastoral spirituality must become a corrective model treating authority as service, spiritual claims as testable, and the pastor-congregation bond as space for restoring dignity. The study argues authentic Pentecostal pastoral spirituality rests not on a leader's claims but on its power to free the congregation toward mature faith, freedom of conscience, accountability, and participation.

Keywords: arbitrary authority; pastoral spirituality; Pentecostal churches; spiritual abuse; spiritual agency

Abstrak

Penelitian ini mengkaji spiritualitas pastoral yang membebaskan sebagai kritik terhadap otoritas arbitrer dalam gereja-gereja Pentakostal, yaitu ketika otoritas pengembalaan bergeser menjadi mekanisme pengendalian melalui sakralisasi keputusan pemimpin atas nama Roh Kudus dan ketaatan. Menggunakan pendekatan kualitatif-konstruktif dengan metode teologi praktis-kritis, data dari kepustakaan mencakup spiritualitas Pentakostal, spiritual abuse, otoritas rohani, dan agensi jemaat. Pertama, otoritas arbitrer bekerja melalui sakralisasi keputusan pemimpin, monopoli klaim Roh Kudus, pelumpuhan diskernemen komunitas, dan penguatan karisma personal. Kedua, dampak paling serius ialah hilangnya agensi rohani jemaat, yaitu melemahnya kemampuan untuk mendengar, menimbang, memilih, dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketiga, spiritualitas pastoral yang membebaskan perlu dikonstruksi sebagai model korektif: otoritas sebagai pelayanan, klaim rohani yang harus diuji, dan relasi gembala-jemaat sebagai ruang pemulihan martabat. Penelitian ini berargumen bahwa spiritualitas pastoral Pentakostal yang autentik diukur bukan dari kuatnya klaim rohani pemimpin, melainkan dari kemampuannya membebaskan jemaat menuju kedewasaan iman, kebebasan nurani, akuntabilitas, dan partisipasi dalam komunitas.

Kata Kunci: agensi rohani, gereja-gereja Pentakostal, otoritas arbitrer, pelecehan spiritual, spiritualitas pastoral



PENDAHULUAN

Spiritualitas pastoral Pentakostal memiliki posisi penting dalam kehidupan gereja karena ia membentuk cara gembala memahami otoritas, relasi, pendampingan, dan tanggung jawab rohani terhadap jemaat. Tradisi Pentakostal tidak memisahkan spiritualitas dari praktik gerejawi secara drastis. Pengalaman Roh Kudus, doa, karunia rohani, penyembuhan, dan kepekaan terhadap tuntunan ilahi menjadi bagian dari kehidupan pelayanan. Steven J. Land menempatkan spiritualitas Pentakosta sebagai integrasi antara teologi, praktik iman, afeksi rohani, dan orientasi pada Kerajaan Allah. Gagasan Land yang paling terkenal adalah *Triad Theological* dari ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi.¹ Otoritas pastoral dalam gereja-gereja Pentakostal sering dipahami sebagai mandat rohani yang berkaitan dengan panggilan Allah dan pimpinan Roh Kudus. Pemahaman ini memberi kekuatan besar bagi pelayanan karena gembala tidak hanya dipandang sebagai pengelola institusi, tetapi juga sebagai pembimbing rohani.²

Kekuatan “pemimpin gereja” dapat berubah menjadi persoalan ketika otoritas pastoral dilepaskan dari akuntabilitas, pengujian oleh komunitas, dan etika pelayanan. M.S. Kgatle menunjukkan bahwa kepemimpinan oleh Roh dalam Pentakostalisme dapat menjadi problematis ketika hanya satu pemimpin dianggap sebagai pihak yang mendengar Roh Kudus, sementara suara jemaat dibungkam.³ Pada titik inilah persoalan otoritas pastoral perlu dibaca secara lebih kritis, terutama ketika kewenangan rohani tidak lagi berfungsi sebagai sarana penggembalaan, melainkan berubah menjadi mekanisme pengendalian. Praktik pastoral yang semula dimaksudkan untuk menuntun jemaat menuju kedewasaan iman dapat mengalami distorsi ketika keputusan pemimpin dijalankan secara sepihak dan tidak membuka ruang untuk koreksi.

Istilah arbitrer perlu ditempatkan secara konseptual sejak awal karena penelitian ini tidak membahas otoritas pastoral secara umum, melainkan otoritas yang dijalankan secara sewenang-wenang. KBBI mendefinisikan “arbitrer” sebagai “sewenang-wenang” dan “manasuka.” Dalam konteks pastoral, otoritas arbitrer dapat dipahami sebagai tindakan kepemimpinan rohani yang berjalan menurut kehendak pribadi pemimpin, tidak transparan, sulit dikoreksi, dan menggunakan bahasa spiritual untuk menuntut kepatuhan jemaat. Praktik otoritas arbitrer menjadi serius karena ia menggeser hakikat pelayanan pastoral dari pemeliharaan jiwa menjadi penguasaan jiwa. Pelayanan pastoral yang sehat semestinya digerakkan oleh kasih, kehadiran, pendengaran, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan orang yang dilayani. Frederick J. Streets menegaskan, kasih merupakan prinsip etis dan motivasi utama dalam pastoral *care and counselling*; *pastoral care* juga menuntut pendengaran mendalam, penghargaan terhadap pengalaman orang yang dilayani, dan relasi yang memulihkan.⁴ Kerangka ini bertentangan dengan pola pastoral yang membungkam, mengontrol, atau menciptakan ketergantungan jemaat pada figur gembala.

Penyalahgunaan otoritas rohani sering kali tidak tampak sebagai kekerasan secara langsung karena dibungkus dalam bahasa kesalehan. Ungkapan seperti “Tuhan berkata”,

¹ Steven Jack Land, *Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom* (New York: Sheffield Academic Press, 2010).

² Johannes Radjagukguk, “Kredibilitas Pribadi Gembala Dalam Pertumbuhan Gereja,” *Diegesis: Jurnal Teologi* 3, no. 2 (2019): 13–24, <https://doi.org/10.46933/dgs.vol3i213-24>.

³ Mookgo S. Kgatle, “Leadership By the Spirit in Pentecostalism: A Transformational Pneumatocracy Approach,” *Acta Theologica* 44, no. 1 (2024): 121–37, <https://doi.org/10.38140/at.v44i1.7566>.

⁴ Frederick J Streets, “Love: A Philosophy of Pastoral Care and Counselling,” *Verbum et Ecclesia* 35, no. 2 (2013): 1–11, <https://doi.org/10.4102/ve.v35i2.1323>.

“Roh Kudus menuntun saya”, “jangan melawan otoritas”, atau “taat kepada gembala berarti taat kepada Tuhan” dapat menjadi alat kontrol ketika tidak diuji oleh firman, komunitas, dan buah karakter Kristus. Lisa Oakley, Kathryn Kinmond, dan Justin Humphreys menunjukkan, spiritual abuse dalam konteks Kristen membutuhkan definisi dan kebijakan yang jelas karena banyak orang mengalami kerugian dalam komunitas gereja, sementara lembaga gereja sering belum memiliki respons perlindungan yang memadai.⁵

Spiritual abuse berkaitan langsung dengan isu otoritas arbitrer karena ia bekerja melalui kontrol, manipulasi, dan pemaksaan dalam konteks keagamaan. Spiritual abuse merupakan bentuk kekerasan emosional dan psikologis yang ditandai oleh pola kontrol dan koersi dalam konteks agama. Bentuknya dapat mencakup manipulasi, eksploitasi, pembatasan pengambilan keputusan, tuntutan ketaatan kepada pelaku, penggunaan teks suci atau ajaran untuk mengontrol, tuntutan diam, serta klaim bahwa pelaku memiliki posisi ilahi. Otoritas arbitrer dalam gereja-gereja Pentakostal perlu dikritik karena ia dapat mengubah klaim pneumatologis menjadi otoritarianisme rohani. Kgatele mencatat, dalam sebagian gereja neo-Pentakostal, pemimpin dapat mengklaim dirinya dipimpin Roh Kudus untuk mengambil keputusan secara tunggal, sehingga pneumatocracy bergeser menjadi autocracy.⁶ Masalah ini muncul ketika pemimpin tidak dapat dikoreksi karena dianggap memiliki otoritas yang mutlak. Pada titik ini, bahasa Roh Kudus tidak lagi membebaskan komunitas, melainkan melegitimasi kekuasaan satu figur.

Merespons keadaan di atas, spiritualitas pastoral yang membebaskan perlu dikonstruksi sebagai koreksi terhadap pola penggembalaan yang menekan kebebasan nurani jemaat. Kebebasan dalam penelitian ini bukan kebebasan individualistik tanpa tanggung jawab gerejawi, melainkan kebebasan rohani untuk bertumbuh, berdialog, membedakan kehendak Allah, dan mengambil keputusan secara dewasa di hadapan Tuhan. Teologi pastoral tidak cukup dipahami sebagai teknik pelayanan atau manajemen gereja. Elaine Graham menunjukkan bahwa pastoral theology perlu diperdebatkan dalam kerangka terapi, misi, dan pembebasan. Perspektif ini penting karena pelayanan pastoral tidak boleh berhenti pada stabilisasi personal, tetapi juga perlu mengkritisi struktur relasi yang membuat seseorang terluka, terdiam, atau kehilangan agensi.⁷ Penelitian ini menempatkan spiritualitas pastoral yang membebaskan sebagai praksis teologis yang menolak dominasi rohani dan mengarahkan jemaat untuk memulihkan martabat.

Penelitian ini memiliki celah akademik yang jelas karena banyak kajian Pentakostal masih berfokus pada karunia Roh, pertumbuhan gereja, penyembuhan ilahi, ibadah ekspresif, dan kepemimpinan karismatik. Kajian tentang spiritualitas pastoral sebagai kritik terhadap otoritas arbitrer masih perlu dikembangkan secara lebih eksplisit, khususnya dalam konteks gereja-gereja Pentakostal. Saya berargumen, otoritas pastoral hanya sah secara rohani apabila ia membangun, memulihkan, dan memerdekakan jemaat menuju kedewasaan iman. Otoritas yang memakai bahasa Roh Kudus tetapi menghasilkan ketakutan, ketergantungan, pembungkaman, dan hilangnya kebebasan nurani tidak dapat disebut sebagai spiritualitas pastoral yang sehat. Penelitian ini tidak menolak

⁵ Lisa Oakley, Kathryn Kinmond, and Justin Humphreys, “Spiritual Abuse in Christian Faith Settings: Definition, Policy and Practice Guidance,” *The Journal of Adult Protection* 20, no. 3–4 (October 18, 2018): 144–54, <https://doi.org/10.1108/JAP-03-2018-0005>.

⁶ Kgatele, “Leadership By the Spirit in Pentecostalism: A Transformational Pneumatocracy Approach.”

⁷ Elaine Graham, “Pastoral Theology: Therapy, Mission or Liberation?,” *Scottish Journal of Theology* 52, no. 4 (1999): 430–54, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S003693060005047X>.

otoritas gembala, tetapi mengkritik penyimpangan otoritas yang mengubah pelayanan menjadi dominasi. Spiritualitas pastoral Pentakostal yang autentik perlu diuji melalui kasih, buah Roh, akuntabilitas, keterbukaan terhadap koreksi, serta dampaknya terhadap pembebasan jemaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konstruktif dengan metode teologi praktis-kritis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur gejala otoritas arbitrer secara statistik, melainkan untuk menafsirkan, mengkritisi, dan mengonstruksi makna teologis dari praktik otoritas pastoral dalam gereja-gereja Pentakostal. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur akademik tentang spiritualitas Pentakostal, teologi pastoral, otoritas rohani, spiritual abuse, kepemimpinan gerejawi, dan etika pelayanan. Sumber utama penelitian mencakup pemikiran Steven J. Land tentang spiritualitas Pentakostal, M.S. Kgatle tentang kepemimpinan oleh Roh, Lisa Oakley, Kathryn Kinmond, dan Justin Humphreys tentang spiritual abuse, Frederick J. Streets tentang pastoral care, serta Elaine Graham tentang teologi pastoral dalam kerangka pembebasan. Literatur tersebut digunakan untuk membangun landasan konseptual sekaligus menguji apakah praktik otoritas pastoral tertentu masih dapat disebut sebagai spiritualitas pastoral yang sehat. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis hermeneutis-kritis melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi konsep-konsep utama, yaitu spiritualitas pastoral, otoritas arbitrer, klaim pneumatologis, pelecehan spiritual, kebebasan nurani, dan pembebasan pastoral. Tahap kedua mengkritisi hubungan antara otoritas pastoral dan praktik dominasi rohani, terutama ketika bahasa Roh Kudus, ketaatan, dan otoritas gembala digunakan untuk menutup ruang koreksi bagi jemaat. Tahap ketiga adalah mengonstruksi model spiritualitas pastoral yang membebaskan sebagai alternatif terhadap praktik otoritas yang arbitrer. Validitas penelitian dijaga melalui konsistensi argumentasi, dialog kritis antarsumber akademik, koherensi teologis, dan relevansi praksis bagi kehidupan gereja-gereja Pentakostal. Melalui metode ini, penelitian berusaha menghasilkan kontribusi konseptual bagi pembaruan pelayanan pastoral yang lebih etis, akuntabel, pneumatologis, dan membebaskan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Teologis Otoritas Arbitrer dalam Spiritualitas Pastoral Pentakostal

Mekanisme teologis otoritas arbitrer dalam gereja-gereja Pentakostal tidak bekerja pertama-tama melalui aturan tertulis, struktur organisasi, atau pemaksaan administratif. Hal ini wajar di gereja-gereja Pentakostal yang jarang memiliki SOP dalam pelayanan pastoralnya. Mekanisme utamanya bekerja melalui sakralisasi keputusan pastoral, yaitu proses ketika keputusan personal pemimpin diberi status rohani seolah-olah berasal langsung dari Allah (*teonomi*). Keputusan yang pada dasarnya bersifat manusiawi, terbatas, dan dapat keliru kemudian dipindahkan ke wilayah “sakral” sehingga sulit dipertanyakan. Maka persoalan utamanya bukan lagi apakah gereja memiliki otoritas pastoral, melainkan bagaimana otoritas itu diberi legitimasi ilahi tanpa mekanisme pengujian yang memadai.

Sakralisasi keputusan pemimpin terjadi ketika “bahasa Roh Kudus” digunakan untuk menaikkan status keputusan pastoral dari opini pemimpin menjadi “kehendak Allah”. Dalam tradisi Pentakostal, kepemimpinan oleh Roh merupakan unsur yang sah

karena pneumatologi berperan penting dalam kepemimpinan gerejawi. Kgatele menyebut model ini sebagai *pneumatocracy*, yaitu kepemimpinan yang dipahami sebagai pemerintahan atau tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan gereja.⁸ Konsep ini pada dasarnya positif karena menolak reduksi kepemimpinan gereja menjadi sekadar manajemen yang manusiawi. Masalah muncul ketika *pneumatocracy* berubah menjadi klaim personal bahwa hanya pemimpin tertentu yang mendengar Roh Kudus, sementara jemaat hanya diminta menerima keputusan tersebut.

Klaim “dipimpin Roh Kudus” menjadi arbitrer ketika dilepaskan dari pengujian firman, komunitas, buah karakter, dan akuntabilitas gerejawi. Spiritualitas Pentakostal tidak boleh dipahami sebagai spontanitas rohani yang kebal terhadap koreksi.⁹ Land justru menempatkan spiritualitas Pentakostal dalam relasi timbal balik antara ortodoksi, ortopatologi, dan ortopraksi, sehingga pengalaman rohani harus berhubungan dengan keyakinan yang benar, afeksi yang dibentuk oleh Allah, dan praksis yang benar.¹⁰ Kerangka ini membuat klaim rohani tidak dapat berdiri sendiri. Klaim tentang pimpinan Roh perlu diuji melalui kesesuaiannya dengan iman gereja, karakter Kristus, serta dampaknya terhadap kehidupan jemaat.

Bahasa rohani memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam komunitas iman karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi, kepatuhan, dan batas-batas legitimasi. Pierre Bourdieu menunjukkan, bahasa dapat berfungsi sebagai *symbolic power*, yaitu kuasa yang bekerja melalui pengakuan sosial terhadap otoritas simbolik tertentu.¹¹ Dalam konteks pastoral Pentakostal, ungkapan seperti “Tuhan berbicara kepada saya” atau “Roh Kudus menuntun keputusan ini” memiliki bobot simbolik yang jauh lebih kuat daripada pernyataan administratif biasa. Jemaat tidak lagi menilai keputusan itu sebagai pendapat seorang pemimpin, melainkan sebagai pesan sakral yang menuntut kepatuhan.

Discernment jemaat menjadi lumpuh ketika suara pemimpin diposisikan lebih tinggi daripada proses pengujian komunitas. Amos Yong menawarkan paradigma Spirit-Word-Community, yaitu refleksi teologis yang berawal dari pengalaman Roh, dibentuk oleh firman, dan diuji dalam komunitas penafsir.¹² Model ini penting karena pengalaman Roh tidak dikurung dalam klaim privat seorang pemimpin, melainkan ditempatkan dalam relasi dengan firman dan komunitas. Keputusan pastoral yang diklaim sebagai tuntunan Roh Kudus perlu dibaca dalam proses komunal agar tidak berubah menjadi otoritas personal yang tidak tersentuh. Otoritas arbitrer menggeser gereja dari komunitas discernment menjadi komunitas penerima instruksi. Kgatele menegaskan bahwa, dalam praktik tertentu, pneumatocracy dapat berubah menjadi autocracy ketika pastor atau nabi membuat keputusan secara tunggal atas nama pimpinan Roh Kudus.¹³ Pergeseran ini tampak ketika pemimpin tidak dapat dikoreksi karena dianggap memiliki otoritas yang

⁸ Kgatele, “Leadership By the Spirit in Pentecostalism: A Transformational Pneumatocracy Approach.”

⁹ Yogi Mahendra, “Transisi Kepemimpinan Pastoral Menuju Emeritasi Dan Dinamika Family Enterprise Dalam Gereja- Gereja-gereja Pentakostal Di Indonesia,” *KURIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 10, no. 3 (2024): 783–93.

¹⁰ Land, *Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom*.

¹¹ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Harvard: Harvard University Press, 1991), 159–63.

¹² Amos Yong, *Spirit-Word-Community: Theological Hermeneutics in Trinitarian Perspective* (Aldershot: Ashgate, 2006).

¹³ Kgatele, “Leadership By the Spirit in Pentecostalism: A Transformational Pneumatocracy Approach.”

berdaulat, sedangkan suara jemaat yang juga diberdayakan oleh Roh justru dibungkam.¹⁴ Mekanisme ini menunjukkan, masalahnya bukan pada keyakinan akan kepemimpinan Roh Kudus, tetapi pada monopoli klaim rohani oleh satu figur.

Pneumatologi Pentakostal yang sehat seharusnya memperluas partisipasi rohani, bukan mempersempitnya pada figur elit. Jika Roh Kudus dicurahkan kepada umat percaya, maka kemampuan membedakan, menguji, dan mengambil bagian dalam keputusan gerejawi tidak dapat dimonopoli oleh seorang pemimpin tunggal. Diskernemen komunal relevan bagi persekutuan orang percaya yang dipenuhi Roh, pembacaan Kitab Suci secara bersama, pengujian roh, dan pengambilan keputusan bersama. Kerangka ini memberikan kritik teologis terhadap otoritas arbitrer karena keputusan pastoral yang sah secara pneumatologis seharusnya membuka ruang bagi partisipasi tubuh Kristus. Mekanisme sakralisasi juga berkaitan dengan otoritas karismatik. Weber menjelaskan bahwa otoritas karismatik bertumpu pada devosi pengikut terhadap kualitas luar biasa yang melekat pada seorang pemimpin. Dalam konteks religius, kualitas tersebut sering dibaca sebagai tanda kedekatan khusus dengan kuasa ilahi. Pola ini membantu menjelaskan mengapa keputusan gembala karismatik dapat diterima tanpa pemeriksaan kritis. Jemaat bukan hanya menaati struktur gereja, tetapi juga memberi devosi personal kepada figur yang dianggap memiliki akses rohani yang istimewa. Di sinilah karisma pastoral dapat bergeser dari karunia pelayanan menjadi sumber dominasi simbolik.

Otoritas arbitrer dalam spiritualitas pastoral Pentakostal bekerja melalui empat lapis mekanisme, sakralisasi keputusan pemimpin, monopoli klaim Roh Kudus, pelum-puhan diskernemen komunitas, dan penguatan karisma personal sebagai sumber legiti-masi. Keempat mekanisme ini membuat keputusan pastoral sulit dikritik karena jemaat merasa sedang berhadapan dengan kehendak Allah, bukan sekadar pendapat manusia. Kritik teologis terhadap mekanisme ini perlu menegaskan bahwa Roh Kudus tidak boleh dipakai untuk menutup ruang koreksi, melainkan harus menjadi dasar bagi pembentuk-an komunitas yang mampu menguji, berdialog, dan bertumbuh bersama. Otoritas pastoral baru dapat disebut rohani apabila ia tidak menghapus suara jemaat, tidak me-nyakralkan kehendak personal pemimpin, dan tidak mengubah spiritualitas menjadi instrumen penguasaan.

Hilangnya Agensi Rohani Jemaat sebagai Dampak Pastoral

Agensi rohani jemaat merupakan kemampuan orang percaya untuk mendengar, menimbang, memilih, dan bertanggung jawab di hadapan Allah secara dewasa. Agensi ini tidak identik dengan kebebasan individualistik yang menolak bimbingan gereja. Agensi rohani merujuk pada kapasitas iman untuk mengambil bagian secara sadar dalam proses discernment, pertumbuhan, pertobatan, pelayanan, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan. Pelayanan pastoral yang sehat seharusnya memperkuat kapasitas ini. Otoritas arbitrer justru melemahkannya karena jemaat tidak lagi dibentuk sebagai subjek iman, melainkan sebagai objek kendali rohani.

Kerusakan paling serius dari otoritas arbitrer bukan hanya rasa terluka, kecewa, atau ketidaknyamanan terhadap pemimpin gereja. Kerusakan yang lebih dalam terjadi ketika jemaat mulai kehilangan kepercayaan pada suara hati, pertimbangan rohani, dan kapasitasnya sendiri untuk berdiri di hadapan Allah. Samuel Fernández, meskipun dari perspektif Katolik, menyebut *abuse of conscience* sebagai penyalahgunaan hati nurani

¹⁴ Mahendra, "Transisi Kepemimpinan Pastoral Menuju Emeritasi Dan Dinamika Family Enterprise Dalam Gereja- Gereja-gereja Pentakostal Di Indonesia."

sebagai tempat kebebasan penilaian dan perjumpaan manusia dengan Allah; penyalahgunaan ini terjadi ketika mediasi gerejawi melampaui batasnya, menguasai, bahkan menggantikan fungsi nurani orang percaya.¹⁵ Perspektif ini penting karena dampak pastoral otoritas arbitrer tidak berhenti pada relasi eksternal antara gembala dan jemaat, tetapi juga masuk ke wilayah batin, tempat jemaat menilai apa yang benar, salah, kudus, berdosa, taat, atau memberontak.

Agensi rohani melemah ketika jemaat terbiasa mengidentifikasi suara pemimpin sebagai suara Allah. Dalam situasi ini, pergumulan iman tidak lagi diolah melalui doa, firman, komunitas, dan pertimbangan nurani, melainkan diserahkan kepada figur rohani tertentu. Jemaat dapat merasa aman karena ada pemimpin yang memberi jawaban final, tetapi rasa aman itu dibayar dengan hilangnya kapasitas spiritual untuk bertanya, menimbang, dan mengambil keputusan. Johannes Häuselmann dan Francisco Insa menjelaskan bahwa penyalahgunaan moral authority paling berbahaya justru karena berakar pada kepercayaan; relasi kepercayaan melemahkan daya kritis dan dapat berkembang menjadi ketergantungan yang membuat seseorang menyerahkan kendali hidupnya kepada pihak lain.¹⁶ Ketergantungan rohani menjadi tanda bahwa pelayanan pastoral telah bergeser dari pendampingan menjadi dominasi. Jemaat yang terus-menerus diarahkan untuk meminta validasi pemimpin atas setiap keputusan penting akan mengalami penyempitan ruang batin. Keputusan mengenai pasangan hidup, pekerjaan, pelayanan, relasi keluarga, pendidikan, bahkan panggilan rohani dapat kehilangan dimensi tanggung jawab pribadi karena harus selalu disahkan oleh figur pastoral. Penyalahgunaan otoritas spiritual dapat menghalangi atau meniadakan kebebasan spiritual korban ketika pelaku mengambil tempat Allah dan mengontrol korban hingga kebebasan rohaninya tersumbat.¹⁷

Luka pastoral dalam otoritas arbitrer sering kali bekerja melalui rasa bersalah religius. Jemaat tidak hanya takut mengecewakan pemimpin, tetapi juga takut dianggap tidak setia kepada Allah. Perbedaan inilah yang membuat otoritas arbitrer dalam gereja lebih kompleks daripada otoritarianisme biasa. Dalam relasi kerja, seseorang mungkin takut kepada atasan. Dalam relasi spiritual yang manipulatif, seseorang dapat merasa bahwa ketidaksetujuannya adalah dosa. Kita harus mampu membedakan penyalahgunaan kuasa biasa dari *spiritual abuse* dan *abuse of conscience*. Dalam penyalahgunaan kuasa biasa, korban takut dihukum oleh atasan; dalam spiritual abuse, korban merasa bahwa ketidaktaatan kepada pemimpin berarti ketidaksetiaan kepada Allah.

Agensi rohani yang rusak dapat menyebabkan kebingungan identitas spiritual. Jemaat tidak lagi mengetahui apakah suatu keputusan lahir dari iman, ketakutan, rasa bersalah, atau tekanan dari komunitas. Kondisi ini membuat spiritualitas menjadi arena konflik batin. Julie J. Exline dkk. menunjukkan bahwa *religious and spiritual struggles* dapat mencakup pergumulan ilahi, pergumulan moral, pergumulan interpersonal, keraguan, dan persoalan makna hidup.¹⁸ Kerangka ini membantu membaca dampak otoritas

¹⁵ Samuel Fernandez, "Towards a Definition of Abuse of Conscience in the Catholic Setting," *Gregorianum* 102, no. 3 (2021): 557–74.

¹⁶ Johannes Häuselmann and Francisco Insa, "Abuse of Power, Spiritual Abuse, and Abuse of Conscience: Similarities and Differences," 2023.

¹⁷ Minggus M. Pranoto, "Sisi Gelap Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 175–86, <https://doi.org/10.21460/gema.2020.52.583>.

¹⁸ Julie J Exline et al., "The Religious and Spiritual Struggles Scale: Development and Initial Validation," *Psychology of Religion and Spirituality* 6, no. 3 (2014): 208–22, <https://doi.org/10.1037/a0036465>.

arbitrer sebagai krisis multidimensional; jemaat bukan hanya bermasalah dengan pemimpin, tetapi juga dapat mengalami gangguan dalam relasinya dengan Allah, dirinya sendiri, komunitas, dan makna panggilannya. Kehilangan agensi rohani juga membuat jemaat sulit mengenali pengalaman lukanya sendiri. Banyak korban spiritual abuse tidak segera menyebut pengalamannya sebagai kekerasan karena tindakan tersebut dibungkus dalam bahasa pelayanan, pemuridan, disiplin rohani, atau ketaatan. Orang-orang masih mengalami kerugian di gereja, sementara kebijakan dan praktik perlindungan terhadap pelecehan spiritual masih perlu dikembangkan. Temuan ini penting dalam konteks Pentakostal karena komunitas yang sangat menghargai otoritas rohani sering kali lebih cepat menafsirkan pertanyaan jemaat sebagai ketidaktaatan daripada sebagai sinyal adanya luka pastoral.

Pemulihan agensi rohani membutuhkan ruang naratif, bukan sekadar nasihat doktrinal. Jemaat yang mengalami otoritas arbitrer perlu diberi ruang untuk menamai pengalaman, menceritakan luka, menguji ulang gambaran tentang Allah, dan merebut kembali kemampuan untuk mengambil keputusan. Sarra Perry menunjukkan, penyintas *religious/spiritual abuse* sering menghadapi ketidakpercayaan dan stigma, tetapi pembagian narasi dapat membantu mereka merebut kembali *agency* dan mengalami validasi dalam proses pemulihan.¹⁹ Temuan ini memberi implikasi pastoral yang tajam: gereja tidak cukup berkata bahwa korban harus “mengampuni” atau “tetap taat”; gereja perlu menyediakan ruang aman agar korban dapat berbicara tanpa kembali dibungkam oleh bahasa rohani.

Dampak pastoral otoritas arbitrer perlu dibaca sebagai krisis pembentukan murid. Tujuan pastoral Pentakostal bukan menghasilkan jemaat yang patuh secara mekanis, melainkan jemaat yang dipenuhi Roh, matang dalam iman, dan mampu membedakan kehendak Allah secara bertanggung jawab. Karena itu, penting menempatkan teologi pastoral dalam percakapan tentang terapi, misi, dan pembebasan; arah ini menolong penelitian melihat pelayanan pastoral bukan hanya sebagai stabilisasi personal, tetapi sebagai praksis yang harus mengoreksi struktur relasi yang melukai. Spiritualitas pastoral yang gagal memulihkan agensi rohani telah kehilangan orientasi pembebasannya.

Agensi rohani jemaat menjadi ukuran kritis bagi kesehatan atau tidaknya praktik otoritas pastoral. Otoritas gembala dapat disebut pastoral hanya bila membuat jemaat semakin mampu mendengar Allah, menguji pengalaman rohani, mengambil keputusan secara dewasa, dan bertanggung jawab atas iman mereka. Otoritas yang membuat jemaat takut berpikir, takut bertanya, takut berbeda, dan takut mendengar nuraninya sendiri tidak lagi membentuk spiritualitas, melainkan menciptakan ketergantungan religius. Dampak paling berbahaya dari otoritas arbitrer bukan sekadar konflik antara gembala dan jemaat, melainkan rusaknya subjek iman. Jemaat yang kehilangan agensi rohani tidak hanya kehilangan suara di hadapan pemimpin, tetapi juga kehilangan keberanian untuk berdiri di hadapan Allah sebagai pribadi yang merdeka.

Spiritualitas Pastoral yang Membebaskan sebagai Model Korektif

Spiritualitas pastoral yang membebaskan bukan sekadar gagasan etis tentang kepemimpinan yang lebih ramah, lebih dialogis, atau lebih partisipatif. Gagasan ini merupakan koreksi teologis terhadap cara otoritas rohani dipahami, dijalankan, dan dilegitimasi dalam gereja-gereja Pentakostal. Otoritas pastoral tidak cukup dibenarkan oleh jabatan, karisma, pengalaman rohani, atau klaim panggilan ilahi. Otoritas pastoral perlu dibuktikan melalui dampaknya terhadap kehidupan jemaat, apakah ia memulihkan atau mene-

¹⁹ Sarah Perry, “Religious/Spiritual Abuse, Meaning-Making, and Posttraumatic Growth,” *Religions* 15, no. 7 (2024): 1–10.

kan, mendewasakan atau membuat bergantung, membuka ruang discernment atau menutup suara komunitas. Spiritualitas pastoral yang membebaskan menempatkan otoritas bukan sebagai hak pemimpin untuk mengatur kehidupan rohani jemaat, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjaga agar jemaat bertumbuh sebagai subjek iman yang merdeka di hadapan Allah.

Model korektif ini perlu dimulai dengan penataan ulang makna kuasa dalam pelayanan pastoral. Kuasa pastoral dalam perspektif Kristiani tidak memiliki bentuk utama berupa dominasi, melainkan pelayanan yang menghidupkan. Dalam kerangka ini, gembala tidak dipahami sebagai pusat kendali spiritual, melainkan sebagai saksi, pendamping, penuntun, dan penjaga ruang pertumbuhan iman. Elaine Graham menempatkan teologi pastoral dalam diskusi tentang terapi, misi, dan pembebasan; arah ini menunjukkan bahwa pastoral care tidak hanya berfungsi sebagai penghiburan personal, tetapi juga harus mengoreksi pola relasi yang melukai dan menghilangkan agensi manusia.²⁰ Otoritas pastoral yang membebaskan harus berani menginterogasi dirinya sendiri, apakah struktur pengembalaan yang ada sungguh memulihkan jemaat, atau hanya membuat jemaat tampak tertib karena takut?

Spiritualitas pastoral yang membebaskan menolak pemisahan antara pengalaman Roh Kudus dan tanggung jawab etis. Tradisi Pentakostal memang memberi tempat sentral kepada pengalaman Roh, tetapi pengalaman itu tidak boleh dilepaskan dari pembentukan karakter dan praktik hidup yang benar. Hubungan dinamis antara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi, yaitu keyakinan yang benar, afeksi yang benar, dan praksis yang benar, dapat menjadi jalan yang ditempuh.²¹ Kerangka ini penting karena pengalaman rohani tidak dapat dinilai hanya dari intensitas emosional, karunia, atau klaim wahyu. Pengalaman Roh harus diuji dari buah etisnya. Otoritas pastoral yang mengklaim dipimpin Roh, tetapi menghasilkan ketakutan, manipulasi, dan pembungkaman, kehilangan koherensi antara iman, afeksi, dan praktik.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan perlu menggeser pola pengembalaan dari kepatuhan pasif menjadi kedewasaan rohani. Jemaat yang dewasa bukan jemaat yang selalu setuju dengan pemimpin, tetapi jemaat yang mampu menguji, berdialog, mengampuni, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan di hadapan Allah. Kedewasaan rohani tidak terbentuk melalui kontrol yang berlebihan. Kedewasaan tumbuh melalui proses pendampingan yang memberi ruang bagi pertanyaan, perbedaan, kegagalan, pemulihan, dan pembelajaran iman. Gembala yang membebaskan tidak takut ketika jemaat berpikir kritis, sebab pertanyaan bukan ancaman bagi iman. Pertanyaan justru dapat menjadi tanda bahwa jemaat sedang belajar untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses diskernemen.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan juga menuntut perubahan dari monolog pastoral menuju diskernemen komunal. Dimulai dari pengalaman Roh, dibentuk oleh firman, dan diuji dalam komunitas penafsir, menjadi kesatuan yang kokoh. Kerangka ini memberikan arah penting bagi gereja-gereja Pentakostal. Pimpinan Roh Kudus tidak seharusnya dimonopoli oleh satu figur, tetapi diuji dalam tubuh Kristus. Keputusan pastoral yang menyangkut kehidupan jemaat perlu membuka ruang dialog, bukan sekadar instruksi satu arah. Komunitas yang dipenuhi Roh bukan komunitas yang diam di

²⁰ Elaine Graham, *Transforming Practice: Pastoral Theology in an Age of Uncertainty* (London: Mowbray, 1996).

²¹ Kenneth J. Archer, "A Pentecostal Way of Doing Theology: Method and Manner," *International Journal of Systematic Theology* 9, no. 1 (2007): 301–14, <https://doi.org/10.1163/15700747-03703005>.

hadapan suara tunggal pemimpin, melainkan komunitas yang bersama-sama belajar untuk mendengar, menimbang, dan menaati Allah.

Model korektif ini harus memasukkan prinsip desakralisasi dalam pengambilan keputusan secara pribadi. Desakralisasi bukan berarti menolak yang sakral atau melemahkan keyakinan terhadap pimpinan Roh Kudus. Desakralisasi berarti membedakan secara jernih antara kehendak Allah dan tafsir manusia terhadap kehendak Allah. Setiap gembala dapat memiliki keyakinan rohani, kesan batin, visi pelayanan, atau pertimbangan pastoral. Semua itu tetap berada dalam wilayah yang manusiawi dan perlu diuji. Keputusan pemimpin tidak boleh secara otomatis diberi status ilahi hanya karena diucapkan dalam bahasa rohani. Gereja yang sehat membutuhkan keberanian untuk berkata bahwa pemimpin dapat tulus sekaligus keliru, rohani sekaligus terbatas, dipakai Allah sekaligus tetap membutuhkan koreksi.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan menempatkan akuntabilitas sebagai ekspresi iman, bukan sebagai ancaman terhadap otoritas. Akuntabilitas sering ditolak oleh pemimpin yang merasa bahwa panggilan rohaninya sudah cukup menjadi dasar legitimasi. Pandangan ini berbahaya karena mengubah otoritas menjadi ruang privat yang sulit disentuh. Akuntabilitas justru melindungi pemimpin dari absolutisasi diri dan melindungi jemaat dari penyalahgunaan kuasa. Dalam gereja-gereja Pentakostal, akuntabilitas perlu bekerja pada beberapa lapis: akuntabilitas kepada Kitab Suci, akuntabilitas kepada komunitas penatua atau majelis, akuntabilitas terhadap etika pelayanan, dan akuntabilitas terhadap suara jemaat yang terdampak oleh keputusan pastoral. Otoritas yang menolak akuntabilitas bukan otoritas yang kuat, melainkan otoritas yang rapuh karena takut diuji.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan perlu membangun ulang relasi gembala-jemaat sebagai relasi pemuridan, bukan relasi kepemilikan. Jemaat bukan milik gembala. Jemaat adalah umat Allah yang dipercayakan untuk dirawat, bukan dikendalikan. Perbedaan ini menentukan arah seluruh praksis pastoral. Gembala yang merasa memiliki jemaat cenderung melihat perbedaan pendapat sebagai bentuk pengkhianatan. Gembala yang memahami jemaat sebagai umat Allah akan melihat perbedaan sebagai bagian dari proses pembentukan tubuh Kristus. Miroslav Volf, dalam diskusi tentang gereja sebagai komunitas, menekankan relasi antara pribadi dan komunitas dalam teologi Kristen serta memandang gereja sebagai komunitas rahmat yang berkumpul dalam Kristus.²² Perspektif ini menolong gereja agar tidak menelan pribadi ke dalam struktur otoritas, tetapi tetap menjaga martabat pribadi dalam kehidupan komunal.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan juga harus memberi ruang bagi suara orang-orang yang terluka. Gereja sering terlalu cepat menjaga nama baik institusi dan terlalu lambat mendengarkan mereka yang mengalami tekanan rohani. Model pastoral yang membebaskan membalikkan prioritas itu. Suara korban, jemaat kecil, anggota yang takut berbicara, dan orang-orang yang pernah dibungkam perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari evaluasi spiritualitas gereja. Gereja tidak dapat mengklaim diri dipimpin Roh Kudus apabila suara mereka yang terluka terus diabaikan. Roh Kudus dalam kesaksian Alkitab bukan hanya memberi kuasa kepada pemimpin, tetapi juga menghibur, membela, menegur, dan memulihkan mereka yang rentan.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan harus memiliki sensitivitas terhadap luka yang tersembunyi di balik bahasa ketaatan. Model ini perlu diterjemahkan ke dalam praktik gerejawi yang konkret. Pertama, gereja perlu membangun mekanisme evaluasi

²² Miroslav Volf, *After Our Likeness: The Church As the Image of the Trinity* (William B. Eerdmans Publishing Company, 1997).

atas keputusan pastoral, terutama keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan pribadi jemaat. Kedua, gereja perlu membedakan konseling pastoral dari kontrol spiritual; nasihat pastoral tidak boleh berubah menjadi instruksi mutlak yang mengambil alih nurani jemaat. Ketiga, gereja perlu menyediakan ruang aman bagi jemaat untuk bertanya, menyampaikan keberatan, dan mencari pendampingan tanpa takut dicap sebagai pemberontak. Keempat, gereja perlu mendidik pemimpin agar mampu membedakan antara otoritas, pengaruh, dan manipulasi. Kelima, gereja perlu menumbuhkan budaya discernment bersama agar keputusan tidak bergantung pada klaim rohani seorang.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan tidak melemahkan dimensi karismatik Pentakostal, melainkan memurnikannya. Karunia Roh tidak perlu dipertentangkan dengan akuntabilitas. Nubuat tidak perlu dipertentangkan dengan pengujian. Kepemimpinan rohani tidak perlu dipertentangkan dengan partisipasi jemaat. Justru dalam tradisi Pentakostal, setiap klaim tentang karya Roh Kudus harus menghasilkan kehidupan yang lebih terbuka terhadap kebenaran, lebih peka terhadap penderitaan, dan lebih berani melawan penindasan rohani. Gereja yang sungguh karismatik bukan gereja yang semua keputusan pemimpinnya dianggap ilahi, melainkan gereja yang seluruh tubuhnya belajar bergerak dalam karunia, kasih, dan discernment.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan dapat dirumuskan melalui 4 gerak utama. Gerak pertama ialah menjernihkan otoritas, yaitu membedakan otoritas pastoral dari dominasi personal. Gerak kedua ialah menguji klaim rohani, yaitu memastikan setiap bahasa Roh Kudus tunduk pada firman, buah Roh, dan diskernemen komunitas. Gerak ketiga ialah memulihkan agensi jemaat, yaitu mengembalikan kemampuan jemaat untuk bersuara, menimbang, memilih, dan bertanggung jawab. Gerak keempat ialah membangun akuntabilitas gerejawi, yaitu menciptakan struktur dan budaya yang mencegah absolutisasi terhadap pemimpin. Keempat gerak ini membuat spiritualitas pastoral tidak berhenti sebagai wacana ideal, melainkan menjadi pola pembaruan bagi gereja.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan akhirnya menegaskan bahwa ukuran utama otoritas pastoral bukanlah seberapa kuat pemimpin ditaati, melainkan seberapa jauh jemaat bertumbuh dalam kebebasan, kasih, kebenaran, dan kedewasaan iman. Otoritas yang sehat membuat jemaat semakin mampu mendengar Allah, bukan semakin takut kepada pemimpin. Otoritas yang sehat membuat jemaat semakin bertanggung jawab, bukan semakin bergantung. Otoritas yang sehat membuat gereja semakin terbuka terhadap koreksi, bukan semakin defensif terhadap kritik. Spiritualitas pastoral Pentakostal yang autentik harus berani mengakui bahwa Roh Kudus tidak hanya memberi kuasa untuk memimpin, tetapi juga memberi kerendahan hati untuk diuji.

KESIMPULAN

Persoalan utama dalam praktik otoritas arbitrer bukan terletak pada keberadaan otoritas pastoral itu sendiri, melainkan pada cara otoritas tersebut disakralkan, dimonopoli, dan dijalankan tanpa pengujian dari komunitas. Dalam konteks gereja-gereja Pentakostal, klaim tentang pimpinan Roh Kudus memiliki tempat teologis yang penting, tetapi klaim tersebut menjadi problematis ketika dipakai untuk mengangkat keputusan personal pemimpin menjadi seolah-olah kehendak Allah yang tidak dapat dikoreksi. Otoritas pastoral yang demikian tidak lagi berfungsi sebagai sarana pengembangan, melainkan berubah menjadi instrumen dominasi rohani yang membungkam discernment jemaat. Dampak paling serius dari otoritas arbitrer ialah hilangnya agensi rohani jemaat. Jemaat tidak hanya mengalami tekanan psikologis atau kekecewaan terhadap pemimpin, tetapi juga dapat kehilangan keberanian untuk mendengarkan, menimbang, memilih, dan

bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika suara pemimpin terus-menerus diposisikan sebagai suara Allah, jemaat berisiko mengalami ketergantungan spiritual, rasa bersalah religius, kebingungan identitas iman, dan ketakutan untuk menyampaikan keberatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa spiritual abuse bukan hanya masalah etika kepemimpinan, tetapi juga masalah teologis karena menyentuh martabat, kebebasan nurani, dan kedewasaan iman jemaat.

Spiritualitas pastoral yang membebaskan ditawarkan sebagai model korektif bagi gereja-gereja Pentakostal agar otoritas pastoral kembali dipahami sebagai pelayanan yang memulihkan, bukan sebagai kekuasaan yang mengendalikan. Model ini menuntut desentralisasi keputusan personal pemimpin, pengujian klaim rohani melalui firman dan komunitas, pemulihan agensi jemaat, serta pembangunan akuntabilitas gerejawi. Spiritualitas pastoral Pentakostal yang autentik tidak melemahkan karisma, nubuat, atau kepemimpinan oleh Roh, tetapi memurnikannya agar tetap menghasilkan kasih, kebenaran, kebebasan, dan kedewasaan. Otoritas pastoral baru dapat disebut rohani apabila ia membebaskan jemaat untuk bertumbuh sebagai subjek iman yang merdeka, bertanggung jawab, dan mampu hidup di hadapan Allah dengan nurani yang sehat.

REFERENSI

- Archer, Kenneth J. "A Pentecostal Way of Doing Theology: Method and Manner." *International Journal of Systematic Theology* 9, no. 1 (2007): 301–14. <https://doi.org/10.1163/15700747-03703005>.
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Harvard: Harvard University Press, 1991.
- Exline, Julie J, Kenneth I Pargament, Joshua B Grubbs, and Ann Marie Yali. "The Religious and Spiritual Struggles Scale: Development and Initial Validation." *Psychology of Religion and Spirituality* 6, no. 3 (2014): 208–22. <https://doi.org/10.1037/a0036465>.
- Fernandez, Samuel. "Towards a Definition of Abuse of Conscience in the Catholic Setting." *Gregorianum* 102, no. 3 (2021): 557–74.
- Graham, Elaine. "Pastoral Theology: Therapy, Mission or Liberation?" *Scottish Journal of Theology* 52, no. 4 (1999): 430–54. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S003693060005047X>.
- — —. *Transforming Practice: Pastoral Theology in an Age of Uncertainty*. London: Mowbray, 1996.
- Häuselmann, Johannes, and Francisco Insa. "Abuse of Power, Spiritual Abuse, and Abuse of Conscience: Similarities and Differences," 2023.
- Kgatle, Mookgo S. "Leadership By the Spirit in Pentecostalism: A Transformational Pneumatocracy Approach." *Acta Theologica* 44, no. 1 (2024): 121–37. <https://doi.org/10.38140/at.v44i1.7566>.
- Land, Steven Jack. *Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom*. New York: Sheffield Academic Press, 2010.
- Mahendra, Yogi. "Transisi Kepemimpinan Pastoral Menuju Emeritasi Dan Dinamika Family Enterprise Dalam Gereja- Gereja-gereja Pentakostal Di Indonesia." *KURIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 10, no. 3 (2024): 783–93.
- Oakley, Lisa, Kathryn Kinmond, and Justin Humphreys. "Spiritual Abuse in Christian Faith Settings: Definition, Policy and Practice Guidance." *The Journal of Adult Protection* 20, no. 3–4 (October 18, 2018): 144–54. <https://doi.org/10.1108/JAP-03-2018-0005>.
- Perry, Sarah. "Religious/Spiritual Abuse, Meaning-Making, and Posttraumatic Growth." *Religions* 15, no. 7 (2024): 1–10.

- Pranoto, Minggu M. "Sisi Gelap Kepemimpinan Pentakostal-Karismatik." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 175–86. <https://doi.org/10.21460/gema.2020.52.583>.
- Radjagukguk, Johannes. "Kredibilitas Pribadi Gembala Dalam Pertumbuhan Gereja." *Diegesis: Jurnal Teologi* 3, no. 2 (2019): 13–24. <https://doi.org/10.46933/dgs.vol3i213-24>.
- Streets, Frederick J. "Love: A Philosophy of Pastoral Care and Counselling." *Verbum et Ecclesia* 35, no. 2 (2013): 1–11. <https://doi.org/10.4102/ve.v35i2.1323>.
- Volf, Miroslav. *After Our Likeness: The Church As the Image of the Trinity*. William B. Eerdmans Publishing Company, 1997.
- Yong, Amos. *Spirit-Word-Community: Theological Hermeneutics in Trinitarian Perspective*. Aldershot: Ashgate, 2006.